HARAPAN DAN TANTANGAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT

Elimartati¹

Elimartati2013@gmail.com

Abstrak: *Keutuhan dan kerukunan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga, tetapi realitas pada masyarakat saat ini banyak terjadi KDRT, pelecehan, terjadinya peningkatan angka perceraian dari tahun ketahun pada 2016 di Pengadilan Agama Batusangkar berjumlah 563. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang dipertanyakan Penerapan dan eksistensinya dalam masyarakat, apakah masyarakat mengerti dan paham tentang UU No.23/2004 diatas. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus KDRT banyak terjadi di masyarakat, tetapi sedikit yang sampai diproses dipengadilan sebagai kasus pidana. Kasus KDRT sering dijadikan sebagai alasan untuk minta cerai yang disidang di Pengadilan Agama. Masyarakat kabupaten Tanah Datar umumnya berpendapat bahwa undang-undang efektif mengurangi terjadinya KDRT, hanya saja masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya malu untuk mengungkapkan kejadian dalam rumah tangganya. Sebagian besar pelaku tindak KDRT dilakukan oleh orang yang miskin dan berpendidikan rendah.*

Kata kunci: Harapan, Tantangan, Penghapusan KDRT

PENDAHULUAN

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam lingkup rumah tangganya. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Terutama terhadap kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan ketidak amanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah terjadinya kekerasan, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam

¹ Penulis merupakan Ketua Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat

rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga kenyataannya banyak terjadi, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai. Menyahuti hal di atas telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga selanjutnya disingkat dengan UU Penghapusan KDRT, pada tanggal 22 September 2004. Keberadaan UU Penghapusan KDRT diharapkan dapat memberikan payung hukum untuk menghapuskan dan mencegah KDRT.

Tetapi kenyataan di tengah masyarakat masih banyak terjadi KDRT. Data dilapangan menyatakan tingkat perceraian di Kabupaten Tanah Datar termasuk rangking 3 tertinggi di sumatera barat yang penyebabnya kebanyakan suami tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya (terjadi penelantaran). Jumlah pasangan suami istri yang bercerai mengalami peningkatan setiap tahun. Hasil observasi yang dilakukan semenjak Oktober 2016 di Pengadilan Agama I.B Batusangkar terlihat banyaknya antrian menunggu jadwal sidang masalah perceraian. Data dokumentasi juga menunjukkan terjadi peningkatan angka perceraian dari tahun ketahun. Untuk data lebih rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1:
Jumlah Perceraian 4 Tahun Terakhir di Kabupaten Tanah Datar

No	Tahun	Jumlah perceraian
1	2013	473
2	2014	502
3	2015	523
4	2016	563
5	2017 (jan-maret)	135
Jumlah	2196	

Sumber: Pengadilan Agama Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapat dihitung bahwa rata-rata peningkatan jumlah perceraian tiap tahun sebanyak 30 kasus. Pemicu terjadinya perceraian diantaranya adalah masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab, selingkuh dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jumlah keluarga atau pasangan

suami istri menurut data Statistik Kabupaten Tanah Datar 2016 sebanyak 87.141. Sedangkan jumlah perceraian selama 4 tahun sebesar 2196 (2, 52%) dari jumlah pasangan. Jika tidak dilakukan antisipasi, maka dapat diprediksi 10 tahun yang akan datang bisa mencapai lebih dari 6%.

Kasus lain yang banyak juga terjadi adalah seperti cabul, pelecehan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Data dari P2TP2A di Tanah Datar saat ini cukup memprihatinkan sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2:
Jumlah Kasus yang Terdata pada P2TP2A Tanah Datar Periode 2016

No	Kasus	Korban laki-laki	Korban perempuan
1	Cabul anak		30
2	Cabul dewasa		1
3	Sodomi	4	
4	KDRT anak		1
5	KDRT dewasa		9
6	Kasus lain-lain anak	5	3
7	Kasus lain dewasa		4
Jumlah		9	48

Sumber: Wawancara dengan pengurus P2TP2A Kabupaten Tanah Datar (Ibu Dra. Hj. Jumiati) tanggal 6 Maret 2017

Kasus yang dikemukakan pada tabel 2 seperti gunung es yang terungkap kepermukaan baru sebagian kecil dan bisa jadi masih banyak kasus yang tidak terungkap karena persoalan malu dan sebagainya. Korban kekerasan dalam rumah tangga, perlu mendapat perlindungan dan menindak pelakunya, dengan upaya tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam UU Penghapusan KDRT pasal 4 menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Mencapai tujuan dan efektifnya pelaksanaan undang-undang ini menimbulkan pertanyaan apakah masyarakat tahu dan mau melaksanakan undang-undang ini, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap undang-undang penghapusan KDRT. Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan meneliti harapan dan tantangan terhadap UU Penghapusan KDRT, yang wilayah penelitian dibatasi pada Kabupaten Tanah Datar. Pembatasan wilayah dilakukan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan pendanaan penelitian. Pembatasan wilayah penelitian tidak berarti mengurangi nilai representatif data, karena penelitian ini termasuk bidang sosial dan dilakukan pada masyarakat yang bersifat homogen dalam masalah kebudayaan dan adat istiadat. Penelitian ini akan mengungkapkan pengetahuan, pemahaman, dan pandangan masyarakat terhadap UU Penghapusan KDRT.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian adalah *field research* artinya data penelitian langsung diperoleh dari lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data penelitian adalah masyarakat yang berkeluarga baik laki-laki maupun perempuan serta para pejabat yang terkait dalam mengambil kebijakan tentang masalah yang diteliti antara lain:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (PMKB) Kasi Peningkatan Peranan Wanita dan Kesenjangan (P2WK) Kabupaten Tanah Datar.
2. Kasat Reskrim POLRES Tanah Datar.
3. Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar.
4. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar.

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah penyebaran daftar pertanyaan dan wawancara, serta studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan teori Miles dan Huberman yakni mereduksi, penyajian dan verifikasi. Proses interpretasi data dilakukan dengan analisis dan sintesis secara kritis, antara telaah teoritik yang menjadi kerangka acuan dari hasil penelitian serta temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian yang sejenis.

PEMBAHASAN

1. Sekilas mengenai UU Penghapusan KDRT

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ditetapkan pada tanggal 22 September 2004. Adapun dasar pertimbangan dikeluarkan UU Penghapusan KDRT sebagaimana yang terdapat dalam konsideran menimbangannya antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau pelakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hal di atas, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 1 UU Penghapusan KDRT menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, penghapusan kekerasan, korban dan perlindungan. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- b. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan/ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga
- d. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan

Pasal 2 menyebutkan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Tujuan yang hendak diwujudkan oleh undang-undang ini adalah bergandengan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dicantumkan dalam KHI pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah mawaddah dan warahmah*. Tujuan perkawinan ini sejalan dengan kandungan ayat 21 surat al-Rum yang artinya “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dilihat dari bentuk kekerasan yang dilakukannya dengan ketentuan penjara

5 sampai 20 tahun atau denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan ringan dan beratnya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang ditimbulkan pada korban.

Selain pidana sebagaimana yang diuraikan di atas hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap korban sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, pemerintah:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Untuk daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;

- d. Memberikan perlindungan bagi pedamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Pasal 14 menyatakan “Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya”

Pasal 15 menyatakan Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Berikut ini akan dipaparkan peran instansi terkait terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga:

- a. Peran Kepolisian

Peran kepolisian dalam perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyidik melakukan langkah-langkah konkrit, pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dengan membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau disebut *Polisi Woman Desk*. Melakukan kerjasama dengan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yaitu di rumah sakit yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Model RPK ini kemudian dikembangkan pada beberapa Polda dan Polres di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan model PKT berkembang menjadi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di seluruh rumah sakit Bhayangkara (Bahan penyuluhan sosialisasi kepolisian Sumbar 30-09-2005).

Upaya hukum dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani oleh personel RPK yang dibantu oleh penyidik POLRI. Dalam permintaan visum/ pengobatan korban polisi bekerja sama dengan PPT BHAYANGKARA, rumah sakit umum setempat di daerah yang bersangkutan dengan biaya sendiri.

Tanggung jawab yang dilakukan oleh polisi di ruang pelayanan khusus antara lain:

- 1) Menerima laporan/pengaduan tentang kekerasan dan korban kejahatan
- 2) Membuat laporan polisi
- 3) Persiapan permohonan VER (visum et revertum)
- 4) Merujuk ke Pusat Krisis Terpadu
- 5) Pemeriksaan saksi korban
- 6) Melakukan konseling
- 7) Memberi kepastian kepada pelapor bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduannya
- 8) Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh agar tidak sampai kepada pihak lain

Ruang pelayanan khusus di kepolisian berfungsi sebagai:

- 1) Menerima pengaduan ataupun mendengar keterangan perempuan dalam kapasitas korban kekerasan
- 2) Memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh perempuan yang mengalami kekerasan
- 3) Memberi konseling

Di samping melakukan tugas pokok dalam penanganan korban kekerasan kepolisian juga mempunyai peran tambahan dalam penanganan kasus KDRT yakni:

- 1) Menerima laporan dari orang yang diberi kuasa oleh korban
- 2) Memberikan perlindungan pada korban/anggota keluarga lain atas perintah pengadilan negeri maksimal selama satu tahun
- 3) Menangkap dan menahan pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, tanpa surat perintah

b. Peran tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan mempunyai peran penting dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelayanan kesehatan yang dilakukan sedini mungkin dapat mencegah terjadinya masalah kesehatan yang serius dan

berlarut larut terhadap korban. Petugas kesehatan mengemban tugas pelayanan yang dibutuhkan korban secara fisik, emosi dan rasa aman.

c. Peran petugas kesehatan

Pada dasarnya peran petugas kesehatan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- 1) Mengidentifikasi adanya kekerasan
- 2) Memberikan perawatan/pengobatan serta pendampingan
- 3) Menginformasikan pada korban tentang tersedianya sumber- sumber daya lokal dalam mencari alternatif yang aman bagi situasi saat itu
- 4) Mengkomunikasikan temuan-temuan dan merencanakan tindak lanjut
- 5) Kemampuan yang harus dimiliki petugas kesehatan

Kemampuan yang perlu dimiliki oleh petugas kesehatan agar berperan dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan penanganan korban yaitu:

- 1) Memahami masalah kekerasan terhadap perempuan dan ketidakberdayaan korban, yang berpengaruh terhadap status kesehatan reproduksi perempuan dan kemampuannya dalam pengambilan keputusan
- 2) Memberikan perlindungan/ dukungan rasa aman bagi korban dengan sikap empati
- 3) Melakukan pengkajian kepada perempuan korban kekerasan yang dialami dengan penuh empati, sehingga korban merasa mendapat dukungan dan pertolongan
- 4) Mengupayakan pelayanan medik keperawatan yang profesional dan manusia
- 5) Memberikan penyuluhan dan meyakinkan perempuan bahwa berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diterima, dan karenanya tidak ada perempuan yang pantas untuk dipukul, dipaksa dalam berhubungan seksual atau didera secara emosional
- 6) Melakukan pekerjaan yang menyangkut medicolegal, seperti : pengumpulan barang bukti, mendokumentasikan semua temuan

temuan untuk proses penyelidikan serta pembuatan visum bila diperlukan

- 7) Melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium terhadap barang bukti
 - 8) Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan
 - 9) Mendeteksi korban kekerasan dan merujuk mereka ke pelayanan yang lain sesuai kebutuhan korban (LSM, kepolisian, Layanan Spesialisasi dan sebagainya)
- d. Peran pekerja sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT

Berdasarkan perspektif pekerjaan sosial, penanganan yang arahnya untuk melakukan perubahan perubahan pada tingkat individu dan keluarga disebut dengan praktek mikro. Sedangkan pelayanan yang arahnya untuk melakukan perubahan pada tingkat organisasi, masyarakat dan kebijakan disebut dengan praktek makro. Praktek mikro adalah pelayan korban tindak kekerasan dan keluarganya dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Case Work* dan *Group Work*. Beberapa tipe pelayanan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Prinsip Penerimaan: dalam menggali dan mengembangkan informasi hendaknya menghargai keberadaan korban tindak kekerasan apa adanya sebagai manusia yang sedang mempunyai permasalahan
- 2) Prinsip Individualisasi: menyadari bahwa setiap korban tindak kekerasan memiliki keunikan dalam menghadapi permasalahan meskipun dengan ciri permasalahan satu sama lain sama.
- 3) Prinsip Kerahasiaan: apa pun yang dilakukan dan diperbuat korban tindak kekerasan harus di rahasiakan, terkecuali bagi para pelaksana untuk kepentingan layanan informasi dengan berlandaskan kode etik yang berlaku.

- 4) Prinsip Partisipatif: dalam penggalian dan pengembangan informasi hendaknya dapat memperhatikan keterlibatan korban tindak kekerasan.
- 5) Prinsip Komunikatif: dalam penggalian dan pengembangan informasi hendaknya didasarkan pada komunikasi timbal balik dengan pendekatan keakraban.
- 6) Prinsip Mawas Diri: bahwa penggalian dan pengembangan informasi berdasarkan pada kaidah profesional bukan emosional, dimana kedudukan penyelenggara dengan korban tindak kekerasan berada pada batas dan kaidah profesi.

Pada praktek makro, pelayanan masalah korban tindak kekerasan dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Community organization / Community development*. Pelayanan ini diarahkan pada:

- 1) Membangun dan mengembangkan kesadaran akan situasi permasalahan dan potensi/sumber pemecahannya
- 2) Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam melakukan *assessment*, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penanganan masalah korban tindak kekerasan berbasis masyarakat.
- 3) Memperkuat kapasitas organisasi sosial yang menangani masalah korban tindak kekerasan baik yang menyangkut administrasi, maupun teknik pelayanannya
- 4) Mengembangkan jaringan kerjasama antar kelompok atau organisasi.
- 5) Mengembangkan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan dan perwujudan keadilan bagi korban tindak kekerasan.

Di samping penanganan tersebut di atas masih ada bentuk pelayanan yang dilakukan di rumah aman (rumah perlindungan) dengan cara :

- 1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
- 2) Memberikan informasi mengenai hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan

- 3) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal yang alternatif
- 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

e. Peran masyarakat

Pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 menyebutkan untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing masing dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Untuk melaksanakan apa yang diatur dalam undang-undang tentang peran masyarakat, salah satu komponen yang cukup berpengaruh menghapus kekerasan dalam rumah tangga di Minangkabau adalah tokoh adat, yang dikenal dengan sebutan *ninik mamak* pemangku adat. Orang empat jinih yaitu penghulu, manti, malin dan dubalang. Sedangkan *orang jinih nan ampek* (jenis yang empat) adalah imam, khatib, bilal dan khadi dan ditambah lagi dengan *orang nan bajinih* yakni orang tuo suku, raja raja rantau, tungganai rumah gandang, bundo kanduang dan parik paga nagari / anak mudo (M.S. Dt Rajo Penghulu, bahan sosialisasi 2005).

Peran tokoh adat ini dalam menghapuskan KDRT adalah dengan menjalankan fungsi dan tugasnya masing masing yang secara adat sudah tertuang dalam tambo adat. Komponen yang lain dalam masyarakat yang juga berpengaruh dalam melakukan tindakan penghapusan KDRT adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti organisasi masyarakat, organisasi keagamaan seumpama majelis ta`lim, RISMA, organisasi kewanitaian dan kepemudaan.

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka menghayati hak dan kewajiban, serta meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum kearah tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan

martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum, salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah melalui penyuluhan hukum.

Undang - Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu dipahami dan disadari masyarakat terutama kaum wanita dalam rangka mewujudkan kedudukannya yang sama di depan hukum. Bahwa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi pokok dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta mematuhi kewajiban hukum. Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pada usaha pembinaan hukum nasional.

Penyuluhan hukum merupakan menyebarluaskan informasi kepada seluruh masyarakat tentang hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai isi maupun mengenai upaya mempertahankan hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum, dan pada pihak lain penyuluhan hukum merupakan membina kesadaran hukum masyarakat termasuk aparat pemerintah dan penegak hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai oleh usaha penyuluhan hukum mengenai UU Penghapusan KDRT antara lain menjadikan masyarakat paham hukum, dalam artian memahami ketentuan yang terkandung dalam undang-undang dan membina serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga setiap masyarakat taat kepada hukum dan secara sukarela tanpa paksaan atau dorongan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Sehubungan dengan tujuan penyuluhan hukum, perlu ditekankan bahwa tujuan penyuluhan hukum tidak semata-mata kesadaran masyarakat mengetahui adanya suatu hukum yang berlaku sah, tetapi juga agar setiap masyarakat menyadari serta memahami efek suatu hukum terhadap hak dan kewajibannya selaku warga negara, dan agar kaidah kaidah hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

Penyuluhan hukum hakekatnya menyentuh proses kejiwaan yang terjadi dalam diri individu selama proses penyuluhan, untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat. Efektifitas keberhasilan penyuluhan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti materi hukum yang diberikan, kemampuan orang yang melakukan penyuluhan, sasaran dan metoda yang dipakai (Departemen Agama, 1997:4). Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengenalan atau pemahaman terhadap materi undang-undang
- 2) Pembentukan sikap dengan menumbuhkan keyakinan manfaat hukum dan merubah sikap yang salah karena tidak dilandasi hukum yang berlaku mejadi prilaku sesuai dengan aturan undang-undang yang diberikan
- 3) Penerapan hukum dengan memotifasi masyarakat bertindak sesuai dengan aturan undang-undang yang diberikan dan dengan sukarela menerapkan dan mematuhi hukum.

Sasaran penyuluhan hukum adalah seluruh warga negara Republik Indonesia, namun karena keterbatasan biaya, sumber daya manusia yang menjadi penyuluh, luasnya wilayah yang hendak dijangkau, maka sasaran masyarakat yang hendak diberi penyuluhan dapat dipilih dan di batasi. Dalam memilih dan membatasi masyarakat yang akan diberi penyuluhan, ditetapkan berdasarkan tahap penyuluhan dan skala prioritas. Menentukan kelompok sasaran masyarakat yang diberi penyuluhan perlu dipertimbangkan kelompok yang secara berantai dapat menyebarluaskan materi penyuluhan kepada lingkungan atau warga kelompoknya masing-masing. Menentukan kelompok yang akan diberikan penyuluhan hukum dapat dilihat dari kelompok profesi, organisai, badan hukum, LSM dan lain-lain. Seperti tokoh masyarakat, PNS, PKK, Dharma Wanita, Wartawan, Aparat penegak hukum dan lain lain.

Menentukan prioritas daerah penyuluhan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- 1) Kerawanan perilaku masyarakat taat hukum dengan indikator tingginya tingkat pelanggaran hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan lemahnya penerapan hukum dalam konteks di atas.
- 2) Lemahnya pengetahuan hukum yang dimiliki dan kurang kepeduliannya terhadap hukum.
- 3) Pertimbangan tingkat daerah pemerintahan seperti provinsi, kabupaten dan lain-lain.
- 4) Posisi strategis warga masyarakat tertentu dalam struktur sosial lingkungannya memberi kekuatan untuk mempengaruhi warga lain dalam jumlah yang lebih besar dan luas.

Penyuluhan adalah suatu kegiatan dalam menyampaikan informasi hukum yang terkandung dalam undang-undang. Pada dasarnya upaya penyuluhan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media yang dipakai

- 1) Media tatap muka dilakukan dengan cara penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, sarasehan, simulasi, penataran dan demonstrasi.
- 2) Media tulis dapat dilakukan dengan bentuk buku, brosur, majalah, surat kabar, spanduk dan pamflet
- 3) Media audio dan audio visual dapat menggunakan radio, tape recorder, pesawat telepon, televisi, film, dan slide\overhead proyektor.
- 4) Media percontohan yaitu membuat daerah percontohan umpamanya dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan penyelesaian kasus yang bernilai baik secara kualitas dan kuantitas

HASIL PENELITIAN

1. Pengetahuan Masyarakat

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu dari 19 Kabupaten di Sumatra Barat, yang di sebut juga Luhak Nan Tuo. Berdasarkan pengamatan fenomena di dalam masyarakat kabupaten Tanah Datar, banyak terjadi kasus KDRT yang sering jadi korbannya adalah perempuan dan anak anak. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan KASATRESKRIM Kabupaten Tanah

datar bahwa ada beberapa kasus perkosaan dan beberapa kasus penganiayaan termasuk kasus KDRT di Kabupaten Tanah Datar. Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar menyebutkan bahwa hakim sering memutuskan kasus kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sudah ada beberapa kasus KDRT yang diproses di Pengadilan Negeri, divonis di antaranya satu tahun penjara berdasarkan pelanggaran Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT.

Data di atas diperkuat dari hasil informasi dari masyarakat yang dijadikan sampel penelitian, terungkap bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui adanya KDRT dan kebanyakan korbannya adalah istri dan anak. Kasus KDRT yang terjadi dimasyarakat sebagian besar tidak dilaporkan ke polisi, hanya di biarkan saja karena korban/ keluarga terdekat merasa malu untuk melaporkannya. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar sebagian besar sudah mengetahui adanya UU Penghapusan KDRT. Mereka pada umumnya mengetahui UU ini melalui media cetak, elektronik dan sebagian kecil dengan membaca UU langsung.

Berdasarkan pasal 11 UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan terjadinya KDRT. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 diatur dalam Pasal 12. Pemerintah Daerah Tanah Datar dalam melaksanakan tugasnya mensosialisasikan undang-undang ini, telah melaksanakan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (PMKB) Kasi Peningkatan Peranan Wanita dan Kesetaraan. Namun baru terlaksana pada sebagian kecil dari wilayah Tanah Datar, belum secara merata. Hal ini dibenarkan oleh pegawai PMKB Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan materi undang-undang yang erat hubungannya dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, materi ini sering juga diberikan oleh penceramah dalam berdakwah. Hal ini terungkap dari hasil penelitian sebagian besar penceramah pernah memberikan materi dakwah tentang KDRT. Sosialisasi undang-undang melalui sarana dakwah sangat baik dan merata. Undang-undang ini akan cepat dipahami oleh masyarakat dan merata ke seluruh wilayah dari kota

sampai ke pedesaan. Dan merupakan tugas pemerintah tentunya memanfaatkan sarana dakwah sebagai sosialisasi undang-undang.

Bentuk tindakan KDRT yang terjadi pada masyarakat Tanah Datar beragam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 undang-undang ini. Kasus kekerasan yang sering terjadi adalah penelantaran rumah tangga seperti meninggalkan anak dan istri tanpa memberi nafkah, kurang perawatan dan pemeliharaan. Sedangkan kasus kekerasan fisik, fisikis dan seksual jumlahnya sedikit sekali.

2. Pemahaman

Indonesia adalah negara hukum, yang menganut paham bahwa hukum merupakan kaedah tertinggi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa kecuali. Hal ini menuntut masyarakat mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku dan manumbuhkan kesadaran hukum agar menghayati dan mengamalkan hak dan kewajibannya. Masyarakat Tanah Datar telah mempunyai kesadaran hukum dan memahami bahwa untuk mengatasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sangat di perlukan adanya undang-undang tentang Penghapusan KDRT. Dan bila terjadi KDRT pada keluarga solusi yang terbaik adalah diproses secara hukum, masyarakat menyatakannya bahwa adanya undang-undang tentang Penghapusan KDRT efektif untuk mengurangi terjadinya kasus KDRT. Hanya saja masyarakat merasa malu untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib, karena dianggap membuka aib keluarga.

Upaya pencegahan terjadinya KDRT sebagian besar informan menyatakan adalah kewajiban kepala keluarga dan sebagian kecil berpendapat kewajiban pemerintah dan ulama. Pasal 11 UU Penghapusan KDRT menyatakan Pemerintah yang bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan ketentuan Pasal 12.

Faktor pemicu terjadinya KDRT yang utama adalah kurangnya mengamalkan ajaran agama dan sebagian kecil menyatakan tidak tahu antara hak dan kewajiban serta faktor ekonomi. Pada umumnya informan menyatakan setuju korban KDRT dilindungi dan pelakunya dihukum sebagaimana yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT. Tentang berat ringannya hukuman terdapat beragam pendapat, sebagian besar menyatakan pelaku dihukum dengan sangat berat dan

sebagian kecil menyatakan dihukum sedang dan ringan. Kasus KDRT yang dilakukan oleh suami sering dijadikan alasan bagi wanita untuk menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Batusangkar dan hanya sedikit sekali yang melaporkannya ke pihak berwajib

3. Pendapat Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Tanah Datar umumnya sangat ingin membaca atau memahami undang-undang secara langsung membaca teksnya. Hanya saja terkendala dalam mendapatkan Undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa UU Penghapusan KDRT belum tersosialisasi secara merata. Faktor ekonomi dan tingkat pendidikan punya pengaruh terhadap tindak pelaku KDRT, sebagian besar pelaku KDRT dilakukan oleh orang yang miskin dan berpendidikan rendah. Pelaku tindak KDRT lebih dipengaruhi oleh perilaku dan pengendalian diri dari setiap orang. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu manakala kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak terkontrol, yang pada akhirnya dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan KDRT.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak KASATRESKRIM dan ketua Pengadilan Negeri Batusangkar serta Ketua Pengadilan agama Batusangkar dihubungkan dengan analisis dari materi UU Penghapusan KDRT dapat dikemukakan titik lemah dari undang-undang ini sebagai berikut :

- a. Sebagian dari Pasal ketentuan pidana bersifat delik aduan seperti yang diatur dalam Pasal 44 ayat (4), 45 ayat (2) dan Pasal 40. Dalam hal ini umpamanya istri sebagai korban tindak KDRT melaporkan suaminya sebagai pelaku tindak KDRT atau sebaliknya suami yang melaporkan istrinya yang melakukan tindak KDRT ke polisi. Kemudian laporannya dicabut kembali karena dapat ancaman dari pelaku tindak KDRT. Tentunya si korban tidak berdaya untuk mendapatkan keadilan, sebagaimana pepatah mengatakan “sudah jatuh dihimpit tangga pula”. Setelah menjadi korban tindak KDRT, mendapat ancaman pula dari pelaku KDRT itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini si korban tidak punya daya upaya untuk mencari keadilan dan minta perlindungan hukum terhadap dirinya.

- b. Sanksi pidana yang berbentuk alternatif antara pidana penjara atau denda, seharusnya hukum yang diberikan berbentuk ancaman berlapis pidana penjara dan denda sehingga hukuman ini membuat jera pelakunya dan merupakan tindakan preventif terhadap yang lainnya. Bila saksi hukum berbentuk penjara atau denda, hal ini dapat merupakan pelecehan terhadap korban KDRT. Bisa saja dimanfaatkan oleh suami yang ingin kawin lagi atau yang kurang senang pada istrinya, melakukan pembunuhan pada istrinya. Hukumannya bisa saja dijatuhkan hakim dengan denda paling banyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai mana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3). Jiwa seorang wanita hanya dihargai dengan uang beberapa juta rupiah saja. dalam hal ini apa yang tercantum pada konsiderat undang-undang ini melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan apa yang dicantumkan dalam tujuan undang yang terdapat pada pasal 4, tidak akan tercapai.
- c. Alat bukti; Pasal 55 mengatur sebagai salah satu yang sah keterangan seorang saksi korban saja cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Ungkapan ini seperti pisau mempunyai dua mata, dalam kondisi tertentu dan kasus tertentu pasal ini mempunyai titik lemah dapat dipermainkan oleh orang-orang tertentu.
- d. Penjelasan umum dari undang-undang nomor 23 tahun 2004 disebutkan bahwa undang-undang ini terikat erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, di antaranya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terutama pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam terutama pasal 116 yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian. Tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga yang

diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2004 termasuk sebagai alasan perceraian yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk minta cerai bagi suami \ istri. Dalam pelaksanaan dan sosialisasi terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini, seharusnya Pengadilan Agama dan jajarannya dilibatkan dalam kegiatan ini. Karena Pengadilan Agama terlibat langsung dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga ini. Kenyataannya Pengadilan Agama tidak pernah dilibatkan terhadap undang-undang ini. Hasil wawancara penulis dengan ketua Pengadilan Agama Batusangkar menyebutkan bahwa bila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban kebanyakan mengadukan kasus ini ke Pengadilan Agama sebagai alasan untuk perceraian. Setelah disidang dan diputuskan oleh Pengadilan Agama, biasanya korban tidak melanjutkan kasus ini ke Pengadilan Negeri, hanya menerima putusan Pengadilan Agama saja.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis terhadap terhadap persepsi masyarakat Kabupaten Tanah Datar terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar sebagian besar sudah mengetahui adanya undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka mengetahuinya melalui media elektronik, media cetak membaca langsung undang-undangnya dan melalui teman. Umumnya masyarakat mempunyai keinginan untuk membaca langsung tesk undang-undang, tetapi mereka mendapat kesulitan untuk memperoleh langsung undang-undang tersebut. Masyarakat pada umumnya mengetahui materi undang-undang melalui materi dakwah yang disampaikan oleh para mubaligh.
- b. Pemahaman masyarakat Kabupaten Tanah Datar terhadap materi undang-undang sebagian besar dapat dikatakan sesuai dengan apa yang diatur

dalam undang-undang ,karena materi undang-undang adalah menyangkut tentang keadaan rumah tangga yang sering juga diberikan dalam materi dakwah \ceramah pada masyarakat.

- c. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar umumnya berpendapat bahwa undang-undang efektif mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya malu untuk mengungkapkan kejadian dalam rumah tangganya dan masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain, sehingga kasus ini tidak sampai ke pengadilan.
- d. Dari materi Undang-undang ditemukan titik lemah tentang sanksi hukuman yang berbentuk penjara atau denda, dengan memakai kata atau hakim dapat menetapkan hukuman dengan denda saja yang akhirnya menimbulkan pelecehan terhadap korban. Begitu juga dengan bentuk delik aduan, hukum bisa dipertanyakan bagi orang-orang yang berperilaku buruk. Juga terdapat titik lemah pada alat bukti yaitu cukup dengan pengakuan korban ditambah alat bukti lainnya.

2. Saran

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu menyosialisasikan Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara menyeluruh di wilayahnya dan dapat memanfaatkan lembaga dakwah sebagai sarana sosialisasi. Dalam penerapan dan sosialisasi undang-undang ini pemerintah seharusnya melibatkan pengadilan agama, karena materi undang-undang sangat erat kaitannya dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1992
- Abdul Azis, Dahlan. (et.al. 1), *Ensiklopedi Hukum Islam* , Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997
- Abd. Al Ati, Hammudah (Alih Bahasa Anshari Thaib) *Keluarga Muslim*, Bina Ilmu Surabaya 1984
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Depag, *Al Quran dan Terjemahnya*, CV Indah Press, Jakarta 1994
- Jack, C.Plano, *Kamus Analisa Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosda Karya Bandung
- Inforkom Tanah Datar, *Sekilas Hasil Pembangunan Tanah datar*
- Prinst, Darwan, *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Adi Tia Bakti 2001
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1999
- PP Aisiyah, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, Yogyakarta 1989
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995
- Soesilo ,R *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* Politea bogor, 1980
- Tholib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Pres, Jakarta 1982
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang No 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Undang No.I tahun 74 *Tentang Perkawinan*
- Undang-undang No.39 Tahun 1999 *Tentang Hak Azazi Manusia*
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan UU No I tahun 74 Kompilasi Hukum Islam*